



Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun

Iis Margiyanti

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jambi

Siti Tiara Maulia

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jambi

Alamat: Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota,
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

Korespondensi penulis: iismrgyt@gmail.com

Abstract. Education is an investment for the creation of quality Human Resources (HR). Through education, one can easily increase one's potential so that one can improve one's life in a better direction. Various efforts have been made by the Government to improve the quality and equity of education. One of the efforts is by holding a 12-year compulsory education program. The policy of the 12 year compulsory education program is expected to be able to succeed and improve the quality of human life. Writing this article using descriptive method and literature study. This research states that the 12-year compulsory education program in Indonesia has not run optimally. There are still areas that have not been able to implement the 12-year compulsory education program. As in Bogor district, which has not maximized the 12-year compulsory education program due to conditions that do not support access to education. Even so, the government continues to strive for this program to be realized properly. The government is trying to make strategies or steps that are expected to anticipate problems in education in Indonesia. This is evidenced by the success of the 12-year compulsory education program in Lampung, namely the large number of Lampung people who have successfully carried out education for 12 years, the large number of schools built in the city and in the interior as well as the participation of the Lampung people who support the implementation of this program..

Keywords: Education, Compulsory Education Program, Government.

Abstrak. Pendidikan adalah suatu investasi bagi terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas. Melalui pendidikan, seseorang dapat dengan mudah meningkatkan potensi diri sehingga dapat memperbaiki kehidupannya kearah yang lebih baik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan. Salah satu upayanya yaitu dengan diadakannya program wajib belajar 12 tahun. Kebijakan program wajib belajar 12 tahun diharapkan mampu mensukseskan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif dan studi literature. Dalam penelitian inimenyebutkan

bahwa program wajib belajar 12 tahun di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Masih ada daerah-daerah yang belum bisa menjalankan program wajib belajar 12 tahun ini. Seperti di kabupaten Bogor yang belum memaksimalkan program wajib belajar 12 tahun dikarenakan kondisi akses pendidikan yang tidak mendukung. Meskipun demikian, pemerintah tidak henti-hentinya mengupayakan agar program ini dapat terealisasi dengan baik. Pemerintah mengupayakan dengan membuat strategi atau langkah yang diharapkan dapat mengantisipasi masalah pendidikan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasilnya program wajib belajar 12 tahun di Lampung yakni banyaknya masyarakat Lampung yang berhasil melaksanakan pendidikan selama 12 tahun, banyaknya sekolah-sekolah yang dibangun di kota maupun di pedalaman serta partisipasi masyarakat Lampung yang mendukung terlaksananya program ini.

Kata kunci: Pendidikan, Program Wajib Belajar, Pemerintah.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan sebuah usaha untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga nantinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Pendidikan yang baik dan bermutu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas individu di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, setiap negara berlomba-lomba untuk merencanakan pendidikan yang setinggi-tingginya bagi setiap warga negaranya. Melalui pendidikan yang bermutu, maka sebuah negara akan melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dapat dilakukan dengan cara melalui pendidikan. Dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI menyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak”, jadi disini dapat kita ketahui bahwa ada upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia.

Upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia dapat kita lihat dari dikeluarkannya berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah dikeluarkannya sebuah program wajib belajar. Dalam peraturan pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang program wajib belajar 9 tahun yang

merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003.

Pada tahun 2013, pemerintah pusat telah mengeluarkan program wajib belajar 12 tahun atau sering disebut dengan program pendidikan menengah universal sebagai lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Adanya program lanjutan ini dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai anak-anak yang putus sekolahnya sehingga ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata dan program tersebut belum sepenuhnya berhasil.

Pemerintah perlu membuat strategi yang baik sehingga memberikan kemudahan layanan dan menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas bagi warga negaranya.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan studi literatur, serta teknik pengumpulan data dengan mengambil studi terdahulu dari 10 jurnal nasional yang berkaitan dengan topik pembahasan penulis yakni implementasi program wajib belajar 12 tahun.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Penulis berusaha mendeskripsikan tentang fenomena analisis kebijakan pendidikan dengan tujuan dan sasaran visi-misi yang diprogramkan pemerintah dapat tercapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penulisan artikel ini didapatkan dengan menganalisis isi dari 10 (sepuluh) jurnal nasional yang berkaitan dengan topik penulis yakni implementasi program wajib belajar 12 tahun.

Program yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya sangat bagus jika terlaksana dengan baik. Program wajib belajar 12 tahun ini dimaksudkan agar generasi bangsa sekurang-kurangnya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga menghasilkan generasi-generasi yang bermutu dan berkualitas. Namun pada kenyataannya program ini masih belum berjalan maksimal. Seperti yang sudah penulis bahas di pendahuluan bahwa masih ada anak yang putus pendidikannya.

Dari sumber yang penulis dapatkan, putusnya pendidikan anak ditengah jalan umumnya terjadi di daerah perdesaan walaupun tidak menutup kemungkinan di daerah perkotaan juga terjadi fenomena tersebut. Faktor penyebab anak putus sekolah yaitu:

1. Faktor Keluarga

Lingkungan keluarga menjadi faktor penyebab anak putus sekolah karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Rendahnya pengetahuan orang tua dan latar belakang pendidikan yang rendah menjadikan anak kurang memiliki cita-cita yang tinggi. Biasanya keluarga yang berlatar belakang seorang petani atau pedagang mewariskan pekerjaannya kepada anak-anaknya.

2. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi yang rendah juga menjadi faktor penyebab putusnya pendidikan anak. Tidak jarang juga kita jumpai bahwa orang tua dengan ekonomi yang sederhana tetap mendukung anaknya untuk terus berpendidikan, namun anak yang enggan melanjutkan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa motivasi anak untuk belajar juga kurang sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan motivasi anak.

3. Keterbatasan Akses Menuju Ke Sekolah

Sulitnya akses jalan dari rumah kesekolah menjadi masalah yang serius yang dapat menjadi faktor penghambat putusnya sekolah anak. Hal ini biasa terjadi di daerah terpelosok atau terpencil yang sarana prasarana jalan masih tanah dan jika musim hujan tiba, jalan tersebut susah untuk diakses. Jarak sekolah yang jauh dan tidak adanya transportasi umum yang mendukung memicu anak untuk malas bersekolah.

4. Minimnya Fasilitas Pendidikan di Suatu Daerah

Pemerintah telah berupaya pemeratakan pendidikan di Indonesia. Namun untuk program wajib belajar 12 tahun di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) belum bisa berjalan secara maksimal yang ditandai dengan tingginya angka putus sekolah, khususnya dari tingkat SMP menuju SMA.

Faktor-faktor tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa jika tidak ditanggulangi. Pemerintah perlu melakukan strategi atau langkah-langkah untuk menunjang keberhasilan program tersebut dan pemerataan pendidikan di daerah 3T, seperti:

a. Pembangunan Fasilitas Sekolah

Untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun bisa dengan memperluas dan menambah ruangan kelas di sekolah sehingga daya tampung peserta didik dapat meningkat. Untuk wilayah 3T, pemerintah bisa menanggulangi kendala-kendala yang telah disebutkan di atas dengan mendirikan sebuah asrama sehingga diharapkan dapat mengurangi angka anak yang putus sekolah.

b. Beasiswa Pendidikan

Dengan diberikannya beasiswa dan pendidikan gratis, maka diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya.

c. Perbaikan Akses Pendidikan

Terkhusus untuk wilayah 3T, program wajib belajar 12 tahun bisa diimplementasikan dengan diadakannya guru keliling, perpustakaan keliling, sekolah kecil, dan lain sebagainya yang bisa menunjang keberhasilan program wajib belajar 12 tahun tersebut. Atau dapat juga dilakukan dengan menyediakan rumah dan kendaraan pintar yang menjadi sarana tempat belajar peserta didik.

d. Sosialisasi Pendidikan

Strategi atau langkah yang terakhir adalah dengan mengadakan sosialisasi pendidikan. Untuk mendorong program wajib belajar 12 tahun dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama antara pemerintah daerah, tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang dapat terus menerus mensosialisasikan pentingnya pendidikan kepada orang tua. Melalui strategi ini diharapkan para orang tua dapat memiliki kesadaran dan kepedulian akan pentingnya pendidikan.

Program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah ini wajib diimplementasikan. Program ini berfungsi memperluas dan pemeratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi warganya. Selain itu, program ini juga berfungsi untuk mengembangkan potensi diri agar dapat hidup secara mandiri dilingkungan masyarakat dan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi sehingga memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Berdasarkan hasil penelitian Yuliwati dalam jurnalnya yang berjudul “Wajib belajar 12 tahun dalam realita di wilayah kabupaten Bogor”, disebutkan bahwa kondisi akses pendidikan di wilayah kabupaten Bogor sangat tidak mendukung penerapan program wajib belajar 12 tahun. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan otonomi daerah. Selain itu, jumlah siswa yang tidak sesuai dengan jumlah sekolah yang ada dalam satu kecamatan tersebut membuat akses pendidikan menjadi makin sulit, adanya budaya yang mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik seperti dilarang menggunakan teknologi atau internet yang pada akhirnya juga meningkatkan angka putus sekolah sehingga implementasi dari program wajib belajar 12 tahun tersebut tidak tercapai.

Program-program yang dibuat dan dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten Bogor tidak tepat sasaran, seperti beasiswa pancakarsa hanya yang diperuntukkan bagi pemuda yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (perguruan tinggi) sedangkan untuk kebutuhan wajib belajar 12 tahun belum maksimal.

Keberhasilan dalam implementasi program wajib belajar 12 tahun bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama maka akan tercapai tujuan dari program tersebut.

Berbeda dengan penelitian Yuliwati, di Lampung program wajib belajar 12 tahun sudah diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Bashori dan Septi Gia Aprima dalam jurnalnya yang berjudul “ Analisis kebijakan program wajib belajar 12 tahun di provinsi Lampung”. Program wajib belajar 12 tahun di Lampung diimplementasikan dengan unsur mutlak yang harus ada, yaitu:

Pertama, unsur pelaksana yaitu organisasi atau perorangan bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari implementasi program tersebut. Implementasi wajib belajar 12 tahun di Lampung merupakan tanggung jawab dinas kota lampung dan satuan pendidikannya. Dinas pendidikan bertugas mengontrol sekolah-sekolah yang ada di Lampung, menyiapkan atau menyediakan anggaran satuan pendidikan dan memfasilitasi satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana hingga tenaga pendidik yang dibutuhkan di sekolah.

Kedua, adanya program yang dilakukan. Kebijakan tidak akan ada artinya jika tidak ada tindakan nyata. Salah satu program yang dilakukan adalah program wajib belajar 12 tahun yakni membebaskan biaya pendaftaran dan SPP serta pungutan-pungutan lainnya.

Ketiga, kelompok sasaran yakni sekelompok orang atau organisasi yang menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya dalam kebijakan. Sasaran wajib belajar 12 tahun adalah masyarakat yang usia 7-18 tahun. Sedangkan anak yang usianya sudah melebihi batas usia sekolah dapat mengikuti program paket A, B, dan C yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan.

Implementasi program wajib belajar 12 tahun di Lampung ternyata memiliki suatu kendala yaitu belum tercukupinya jumlah guru terutama pada daerah terpelosok. Selain karena kurangnya guru, minimnya anggaran pendidikan juga menjadi salah satu pemicu terhambatnya program ini. Kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya anggaran pendidikan. Keterbatasan dana akan berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan seperti masih kurangnya sarana dan prasarana bagi sekolah.

Kendala lain dari pengimplementasian program wajib belajar 12 tahun adalah sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi maka sekolah wajib menerima peserta didik di wilayah sekolah, akan tetapi di Lampung belum sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut karena jumlah sekolah masih belum merata. Sistem ini belum diterapkan sepenuhnya karena keterbatasan daya tampung sekolah yang ada sehingga peserta didik boleh mendaftar di luar wilayah zonasi.

Selain hal tersebut, hal yang tak kalah penting adalah kondisi sosial, status sosial orang tua dan pendidikan orang tua sangat mempengaruhi terhadap pendidikan anaknya. Sehingga ada beberapa anak yang putus sekolah disebabkan dengan kondisi sosial atau lingkungan yang dapat mempengaruhi.

Kendala-kendala yang telah dipaparkan diatas tidak menjadikan program ini tidak terlaksana dengan baik. Implementasi program wajib belajar 12 tahun di Lampung sudah hampir mencapai keberhasilan yang maksimal dengan didukung 95% masyarakat lampung yang berhasil mencapai pendidikan selama 12 tahun. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pembangunan sekolah-sekolah di kota maupun dipedalaman provinsi Lampung mulai dari SD,SMP, hingga SMA juga dari partisipasi dan semangat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di bangku sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pendidikan merupakan usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Melalui pendidikan seseorang dapat merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Di Era sekarang ini, negara berlomba-lomba untuk merencanakan pendidikan yang setinggi-tingginya bagi setiap warga negaranya. Melalui pendidikan, negara bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu.

Ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia yaitu dengan membuat program wajib belajar 12 tahun atau sering juga disebut dengan program pendidikan menengah universal. Program ini merupakan program lanjutan dari wajib belajar 9 tahun.

Program wajib belajar 12 tahun dimaksudkan agar generasi bangsa sekurang-kurangnya tamatan sekolah menengah atas. Program ini juga dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045.

Pada kenyataannya program wajib belajar 12 tahun ini belum berjalan maksimal di daerah-daerah tertentu. Di kabupaten Bogor, kondisi akses pendidikan sangat tidak mendukung penerapan program tersebut karena adanya kebijakan otonomi daerah, jumlah siswa yang tidak sesuai dengan jumlah sekolah serta adanya budaya yang mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. Selain itu beasiswa panca karsa hanya diperuntukkan bagi pemuda yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi sedangkan untuk kebutuhan wajib belajar 12 tahun belum dimaksimalkan.

Lain halnya di Lampung, program wajib belajar 12 tahun sudah diimplementasikan dengan baik meskipun terdapat kendala-kendala yang menghambat pengimplementasian program tersebut. Kendala tersebut berupa belum tercukupinya jumlah guru, minimnya anggaran pendidikan serta adanya sistem zonasi dan kondisi sosial atau status sosial orang tua dan pendidikan orang tua peserta didik.

Kendala tersebut bisa diatasi dengan baik dengan banyaknya masyarakat Lampung yang berhasil mencapai pendidikan selama 12 tahun serta banyaknya sekolah-sekolah yang dibangun di kota maupun di pedalaman provinsi dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan anak-anaknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis adalah upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan Indonesia yang berkualitas harus terealisasi dengan baik.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan pendidikan sehingga Pemerintah perlu membuat strategi yang baik sehingga memberikan kemudahan layanan dan menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 tahun bagi warga negaranya.

DAFTAR REFERENSI

- Kusuma Wardani Welly. (2015). Implementasi Program wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur). *Journal Of Politic and Government Studies*, 1–18.
- Sugardha, I. A. (2018). Upaya Ke Arah Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Majalengka; Pendekatan Kebijakan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(2), 252–263. <https://doi.org/10.17509/jap.v25i2.15640>
- Aprima, S. G., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (2019). *Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di. 1*, 18–28.
- Yuliwati, Y. (2022). Wajib Belajar 12 Tahun Dalam Realita di Wilayah Kabupaten Bogor. *Wiyata Dharma : Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 10(2), 110–118. <https://doi.org/10.30738/wd.v10i2.14032>
- pradata. (2015). Evaluasi wajib belajar 12 tahun pada masyarakat miskin di kelurahan wonokusumo kecamatan semampir kota surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(Nomor 2), 176–185.
- Yıldırım, S. (2018). *KAMPUNG PENDIDIKAN DAN UPAYA MENSUKSESKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN*. 02(21), 1–9.
- Suarez, L. Y. T. (2015). *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TANAH LAUT (DALAM RANGKA PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN)*. 1(1), 1–27.
- Hardiasanti, M., & Trihantoyo, S. (2021). Implementasi Wajib Belajar Di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 09(05), 1064–1077.
- Yuniar, D. P. (2021). Faktor Penyebab Putus Sekolah Pada Anak Di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Sonowangi Kabupaten Malang). *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 6(1), 99–107. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/view/11428>
- Hizam, I., & Kan, A. (2019). Problematika Penerapan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun Pada Anak Nelayan Di Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong. *Society*, 10(1), 38–52. <https://doi.org/10.20414/society.v10i1.1487>